



Kabupaten
Minahasa

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BERANI
NJUR,
HEBAT!



Ngintip Fb Kami Yukkk....

Dpmptsp Kabupaten Minahasa



Kirim Email Di Sini

dpmptsp-minahasa@gmail.com



Kunjungi Laman Kami

www.pmptsp-minahasa.id



Kami Tunggu Di Sini Ya....

Manguni No. 7b, Sasaran,

Tondano Utara

95614

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan rancangan akhir rencana strategis (ranhir renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten dan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance.

Ranhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024), dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan ranhir rencana strategis (Ranhir renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan walaupun masih jauh dari sempurna sehingga bantuan dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang dan semoga rencana strategis ini dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan khususnya pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Tondano, SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS,



Mekry J. Sondey, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Daftar tabel	iii
Daftar gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2. Dasar hukum penyusunan	7
1.3. Maksud dan tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD	12
2.1. Gambaran pelayanan PD	12
2.2 Permasalahan dan isu strategis PD	3535
BAB III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan	4747
3.1. Tujuan renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.....	4949
3.2. Sasaran renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029	4949
3.3. Strategi renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029	522
3.4. Arah kebijakan renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.....	522
BAB IV Program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.....	5454
4.1. Program	5555
4.2. Kegiatan	56
4.3. Subkegiatan dan pagu indikatif	669
4.4. Subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah.....	8484
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui IKU	8787
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKK	88
4.7. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKD	89
BAB V Penutup.....	9090

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2025	19
Tabel 2.2	Komposisi pegawai menurut golongan dan jenis Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan Tahun 2025	20
Tabel 2.4	Komposisi pegawai menurut golongan dan eselon Tahun 2025	20
Tabel 2.5	Komposisi pegawai menurut pendidikan dan eselon Tahun 2025	21
Tabel 2.6	Komposisi pegawai menurut pendidikan dan jenis Tahun 2025.....	21
Tabel 2.7	Daftar nama-nama pegawai DPMPTSP Kabupaten Minahasa	22
Tabel 2.8	Daftar BMD pada pengguna barang	23
Tabel 2.9	Jumlah investor PMDN/PMA skala nasional Tahun 2019-2023	29
Tabel 2.10	Jumlah proyek dan nilai investasi Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.11	Jumlah realisasi perizinan, non perizinan dan nilai investasi	30
Tabel 2.12	Kinerja penyelenggara pemerintah daerah 2024 - 2029	31
Tabel 2.13	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	32
Tabel 2.14	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah	34
Tabel 2.15	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	36
Tabel 2.16	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD.....	37
Tabel 2.17	Isu Strategis PD	46
Tabel 3.1	Rumusan tujuan, sasaran dan indikator RPD Tahun Periode 2025-2029	49
Tabel 3.2	Tujuan, sasaran dan indikator DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun Periode 2025-2029	50
Tabel 3.3	Teknik merumuskan tujuan dan sasaran ranhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa	51
Tabel 3.4	Penahapan renstra PD	52
Tabel 3.5	Teknik merumuskan arah kebijakan renstra PD	53
Tabel 4.1	Program DPMPTSP Kabupaten Minahasa	55
Tabel 4.2	Teknik merumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan ranhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa	56
Tabel 4.3	Rencana program/ kegiatan/ subkegiatan dan pendanaan	69
Tabel 4.4	Daftar subkegiatan prioritas pembangunan daerah ranhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa	84
Tabel 4.5	Indikator kinerja utama (IKU)	87
Tabel 4.6	Indikator kinerja kunci (IKK)	88
Tabel 4.7	Indikator kinerja daerah (IKD)	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proses Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa	5
Gambar 1.2	Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan lainnya	6
Gambar 2.1	Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Minahasa	19
Gambar 3.1	Konsep renstra PD.....	48
Gambar 3.2	Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD ...	48
Gambar 4.1	Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan renstra PD...	54



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara bersamaan/ simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD yang secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan RPJPD.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logik model, berfikir sistem, dan sistem dinamik tidak hanya sekedar rutinitas administratif, tetapi menjadi alat perencanaan yang strategis, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional dan mengedepankan potensi lokal serta semangat otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan program-program yang nyata, solutif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen teknis perencanaan operasional pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun di bawah koordinasi Bappelitbangda Kabupaten Minahasa. Renstra berfungsi untuk menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas perangkat daerah; menyelaraskan kebijakan sektoral dengan RPJMD; menentukan indikator kinerja

dan target tahunan; menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tahunan.

Dalam penyusunannya, Renstra juga wajib berbasis pada capaian kinerja sebelumnya, bersifat outcome-oriented, serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

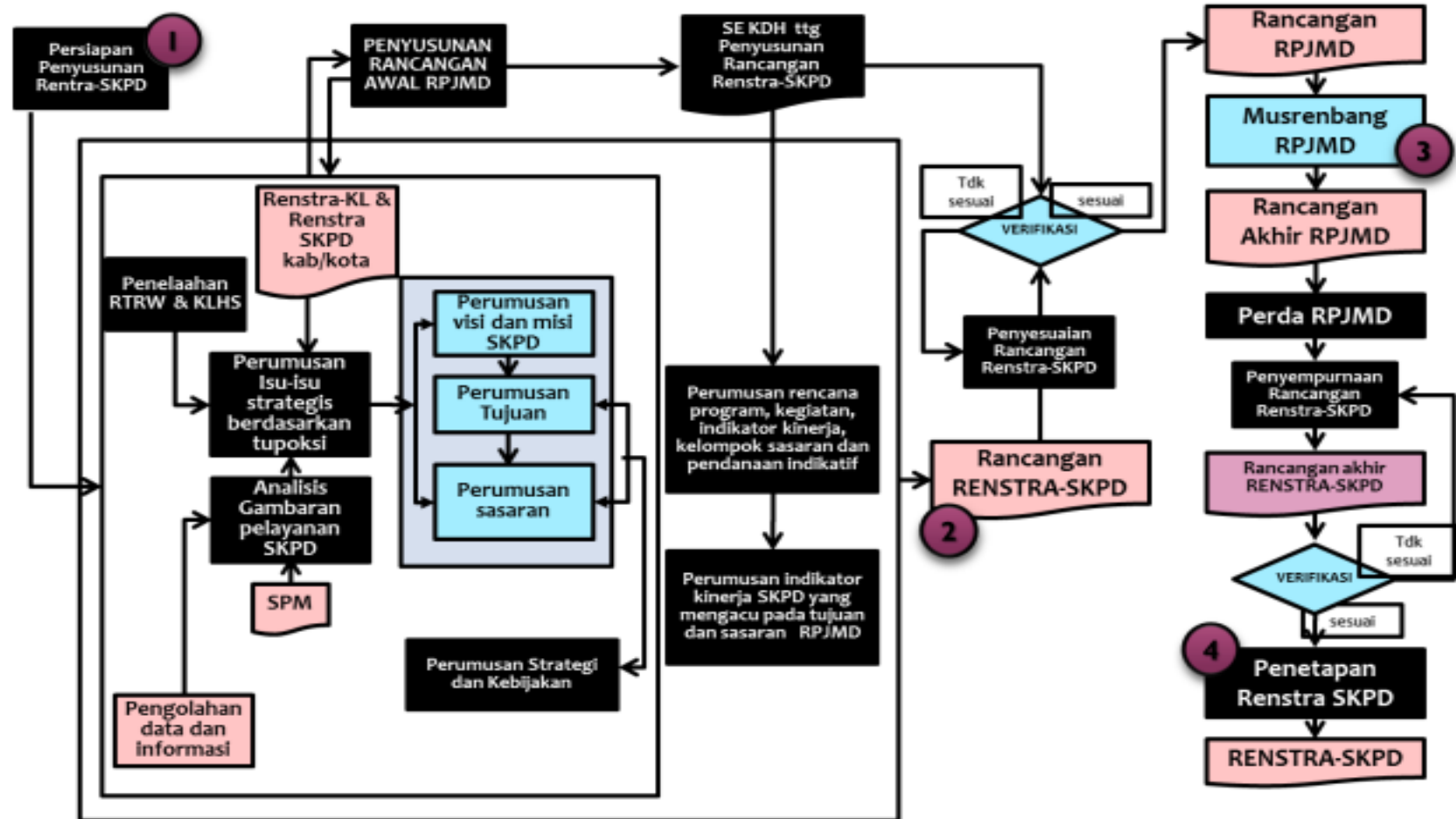
Adapun tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa meliputi :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

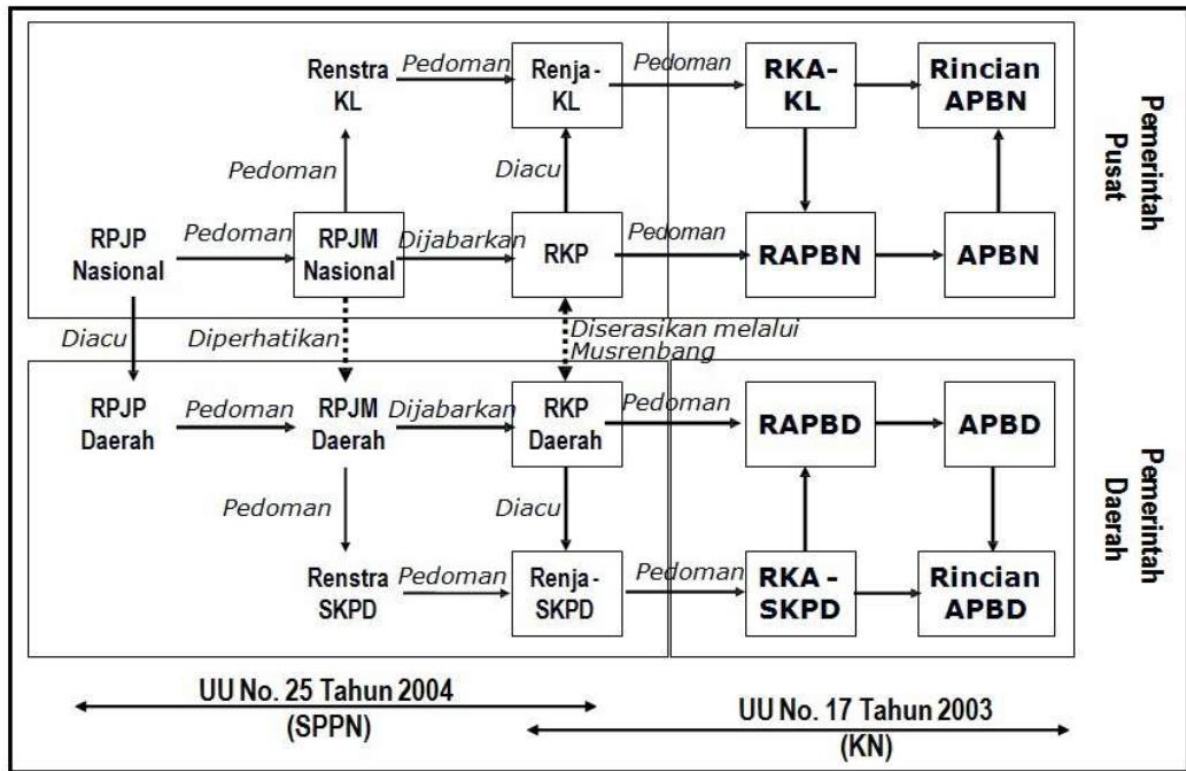
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Minahasa agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Gambar 1.1. Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa



Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan lainnya



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang mewajibkan DPMPTSP memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan.

1.2. Dasar hukum penyusunan

Dasar hukum penyusunan rancangan akhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Surat edaran Mendagri Dirjen Bina Bangda No. 500/1191/V/Bangda tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
31. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
32. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan rancangan akhir renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Merumuskan keselarasan antara tujuan, sasaran RPD dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran secara operasional dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan fungsi;

4. Dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan rancangan akhir renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah :

1. Tersusun dan terdokumentasinya perencanaan kerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa sebagai sarana pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bagi ASN sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Menyusun strategi dan program kegiatan sub kegiatan PD;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran dalam jangka waktu tertentu;
4. Terbangunnya kreatifitas, pemikiran, sikap dan tindakan menuju keberhasilan kerja organisasi secara optimal, efisien dan efektif;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan akhir renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD

- 2.1. Gambaran pelayanan PD
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur PD
 - 2.1.2 Sumber daya PD
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan PD
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan isu strategis PD
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan PD
 - 2.2.2 Isu strategis

BAB III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV Program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan

- 4.1 Uraian program
- 4.2 Uraian kegiatan
- 4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan penanaman modal.

2.1. Gambaran pelayanan PD

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur PD

Tugas DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi DPMPTSP Kabupaten Minahasa terdiri dari :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur DPMPTSP Kabupaten Minahasa terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian umum dan perlengkapan;
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
3. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim, membawahi kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, membawahi kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang pengendalian, membawahi kelompok jabatan fungsional;
6. Bidang pelayanan perizinan terpadu, membawahi kelompok jabatan fungsional;
7. Kelompok jabatan fungsional
8. Tim teknis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas lain dan fungsi sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;

- b. Kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan bagian umum, kepegawaian dan urusan program anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub bagian umum dan
2. Kelompok jabatan fungsional.

- 1.1. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi.

Mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana anggaran pada sub bagian umum;

- b. Mengelolah dan menata administrasi kesekretariat dan menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian umum;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang, perlengkapan serta pemeliharaan, pemanfaatan barang investaris;
- d. Menyiapkan rencana kebutuhan unit dan mengusulkan pengurus barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- f. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris serta melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD) Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang kearsipan dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal baik untuk program jangka pendek, maupun program jangka panjang dalam skala lokal, nasional dan internasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah serta;
 - b. Analisis dan penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal di daerah serta analisis serta perumusan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi kebijakan Penanaman modal di daerah;
 - d. Penetapan pemberian fasilitas dan penetapan kebijakan daerah dalam fasilitas / insentif di bidang penanaman modal;
 - e. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - f. Pembuatan peta potensi investasi serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha;
 - g. Penyusunan rencana umum penanaman modal;
 - h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
4. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta promosi penanaman modal daerah serta melakukan peneliti dan pengkajian, hubungan kerjasama, investasi, pengelolaan dan pemberdayaan di bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanaman modal;
 - b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - c. Pelaksanaan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
 - d. Pengembangan strategi promosi dan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;

e. Penyusunan strategi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

f. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

5. Bidang pengendalian mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah serta kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

c. Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;

d. Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

e. Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

f. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

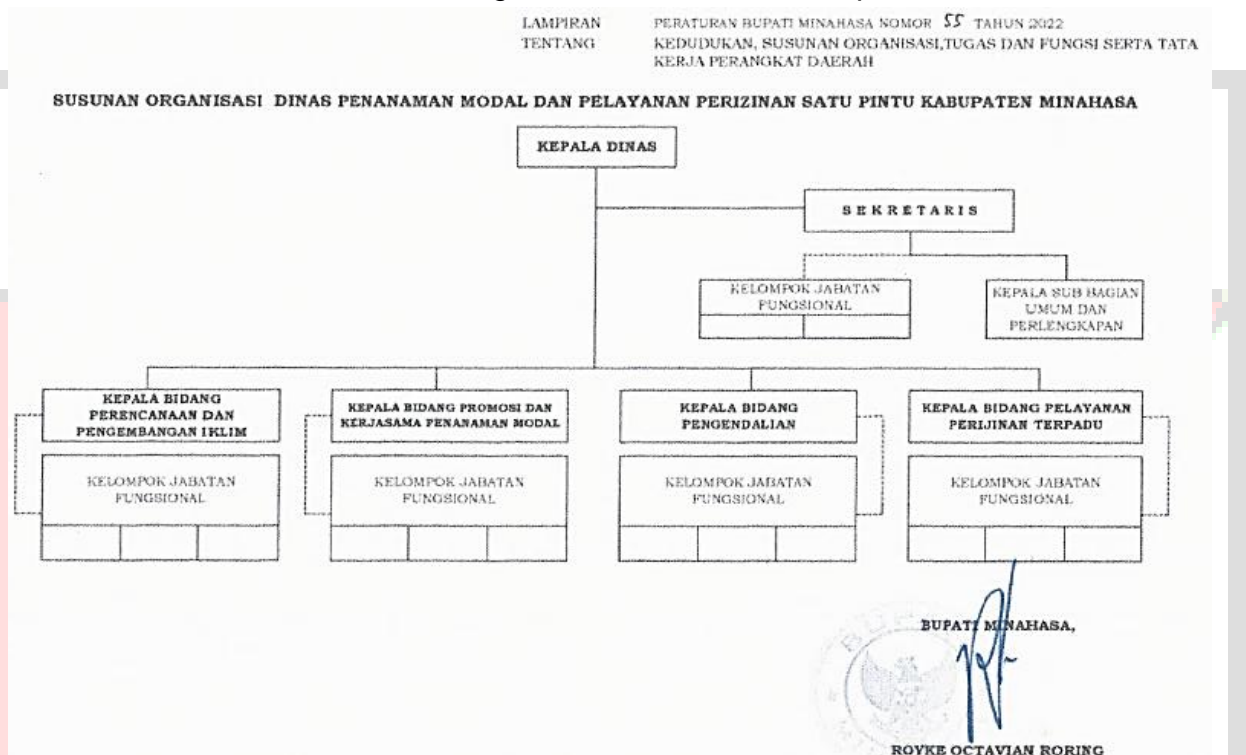
6. Bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi proses bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis serta Penyusunan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelayanan perizinan terpadu;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan penyelenggaraan pemberian data dan informasi perizinan dan non perizinan;
 - c. Penyelenggaraan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 - d. Penyelenggaraan pengaduan terkait pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan dan penyelenggaraan layanan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitasi kegiatan usaha/ inventasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. Pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik serta evaluasi layanan perizinan dan non perizinan termasuk penyelesaian pengaduan pada unit PTSP;
 - f. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - g. Pemantauan pemenuhan perizinan dan nonperizinan;
 - h. Penyedia layanan konsultasi dan pengelolaam pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - i. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
7. Tim teknis
- Pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan DPMPTSP dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMPTSP melalui kepala bidang yang bersesuaian.
8. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.1. Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Minahasa



2.1.2. Sumber daya DPMPTSP

2.1.2.1 SDM

Jumlah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebanyak 14 Orang, tenaga teknis 2 Orang, tenaga administrasi sebanyak 5 Orang, petugas kebersihan 1 Orang dan sopir 1 Orang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2025

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	1	2	3
4	Kepala Sub Bagian	-	1	1
5	JFT	2	6	8
6	Tenaga Teknis	2	-	2
Jumlah				16

1	Tenaga Administrasi	3	-	3
2	Petugas Kebersihan	1	-	1
3	Sopir	1	-	1
Jumlah				5

Tabel 2.2
Komposisi pegawai menurut golongan dan jenis Tahun 2025

Golongan	Jenis		Jumlah
	Pria	Wanita	
ORGANIK			
IV	2	3	5
III	2	7	9
TIM TEKNIS			
IV	1	-	1
III	1	-	1
Jumlah			16

Tenaga Administrasi	3	-	3
Petugas Kebersihan	1	-	1
Sopir	1	-	1
Jumlah			5

Tabel 2.3
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan Tahun 2025

Pendidikan	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
ORGANIK					
Pasca Sarjana	2	-	-	-	2
Sarjana	3	9	-	-	12
TIM TEKNIS					
Sarjana	1	1	-	-	2
Jumlah					16

Tenaga Administrasi (Sarjana)					3
Petugas Kebersihan (SLTA)					1
Sopir (SLTA)					1
Jumlah					5

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut golongan dan eselon Tahun 2025

Golongan	Eselon				Pelaksana	Jumlah
	II	III	IV	JFT		
ORGANIK						
IV	1	4	-	-	-	5
III	-	-	1	8	-	9
TIM TEKNIS						
IV	-	-	-	-	1	1
III	-	-	-	-	1	1
Jumlah						16

Tenaga Administrasi						3
Petugas Kebersihan						1

Golongan	Eselon				Pelaksana	Jumlah
	II	III	IV	JFT		
Sopir						1
Jumlah						5

Tabel 2.5
Komposisi pegawai menurut pendidikan dan eselon Tahun 2025

Pendidikan	Eselon			JFT	Pelaksana	Jumlah
	II	III	IV			
ORGANIK						14
Pasca Sarjana	1	1	-	-	-	2
Sarjana	-	3	1	8	-	12
TIM TEKNIS						2
Sarjana	-	-	-	1	1	
Jumlah						19
Tenaga Administrasi						3
Petugas Kebersihan						1
Sopir						1
Jumlah						5

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut pendidikan dan jenis Tahun 2025

Pendidikan	Jenis	
	Pria	Wanita
ORGANIK	4	10
Pasca Sarjana	1	1
Sarjana	3	9
TIM TEKNIS	2	-
Sarjana	2	-
Jumlah	6	10
Tenaga Administrasi	3	-
Petugas Kebersihan	1	-
Sopir	1	-
Jumlah	5	-

Tabel 2.7
Daftar nama-nama pegawai DPMPSTP Kabupaten Minahasa

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Mekry J. Sondey, SE, M.Si NIP. 19660506 199003 1 013	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas
Sekretariat			
2	Alice Barbara Lumanauw, SH NIP. 19700112 200501 2 008	Pembina / IV a	Sekretaris Dinas
3	Ivana Pangayoan, SE NIP. 19810708 200212 2 004	Penata Tkt I / III d	Kasubag Umum & Perlengkapan
4	Mei Liana Dewi, ST NIP. 19750522 200604 2 004	Penata Tkt I / III d	Perencana Muda
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM			
5	Jessy V. Tiwang, SS, ME NIP. 19840219 200902 2 002	Pembina / IV a	Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim PM
Bidang Promosi dan Kerjasama PM			
6	Diana Rondonuwu, SS NIP. 19700813 200312 2 007	Pembina / IV a	Kabid Promosi & Kerjasama PM
7	Mintje Palilingan, S.Sos NIP. 19710525 199402 2 002	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
8	Selfie B. Gimon, SIP NIP. 19730822 201001 2 003	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
Bidang Pengendalian			
9	Arge Audy Massie, SIP NIP. 19750418 200906 1 001	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu			
10	Victor I. Tambariki, SIP NIP. 19780312 200501 1 011	Pembina / IV a	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu
11	Royke O. Lomboan, SIP NIP. 19771016 200501 1 013	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
12	Nortje L. Weku, SH NIP. 19711122 200212 2 004	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
13	Silvia N. Walalangi, S.Sos NIP. 19780915 200902 2 002	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
14	Casey Kirey Malonda, S.Tr.I.P NIP. 20020426 202510 2 002	Penata Muda / III a	Penata Perizinan Ahli Pertama
Staf Teknis			
15	Ariel Mantiri, ST NIP. 19830124 200501 1 002	Penata / III c	Staf Teknis PUPR
16	Fredrik V. M. Rondonuwu, SST NIP. 19730309 199703 1 005	Pembina Tingkat I / IV b	Staf Teknis DINKES
THL			
1	Hendra Isak Senduk, SE		Tenaga Administrasi Perkantoran
2	Andre Brayen Sengkey, SE		Tenaga Administrasi Perkantoran
3	Alfian Sanny Wuysang		Tenaga Administrasi Perkantoran
4	Alfa Bible Mogot, SIP		Petugas Kebersihan
5	Joudy Toshikatzu Tiraada		Sopir

2.1.2.2 Sarana dan prasarana

Tabel 2.8

Daftar BMD pada pengguna barang

Pengguna Barang : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kode Lokasi : 20.00.00

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Kondisi Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peralatan dan mesin			130,00			
	Alat angkutan			2,00			
	Alat angkutan darat bermotor			2,00			
	Kendaraan dinas bermotor perorangan			1,00			
003	Station wagon	Station wagon	Merk: toyota inova	1,00	unit	31/10/2019	Baik
	Kendaraan bermotor beroda dua			1,00			
001	Sepeda motor	Sepeda motor	Merk: Honda	1,00	unit	30/11/2016	Rusak ringan
	Alat bengkel dan alat ukur			1,00			
	Alat ukur			1,00			
	Universal tester			1,00			
010	Scanner (universal tester)	Scanner (universal tester)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
	Alat kantor dan rumah tangga			31,00			
	Alat kantor			9,00			
	Mesin ketik			1,00			
999	Mesin Tik lain-lain	Mesin tik lain-lain	Merk: Brother	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
	Alat penyimpan perlengkapan kantor			4,00			
002	Lemari kayu	Lemari kayu	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2014	Rusak ringan
007	Brandkas	Brandkas	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2010	Baik
007	Brandkas	Brandkas	Merk: krisbow	1,00	unit	08/12/2015	Baik
028	Lemari makan	Lemari makan	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak ringan
	Alat kantor lainnya			4,00			
003	Papan visual/papan nama	Papan visual/papan nama	Merk: 0	1,00	unit	24/05/2016	Baik
023	Overhead projector	Overhead projector	Merk: View Sonic PA503X	1,00	unit	23/06/2020	Rusak berat
068	Alat sidik jari	Fingerspot Revo WFV-208BNC	Merk: Fingerspot Tipe: Revo WFV-208BNC	1,00	Buah	21/12/2022	Baik
076	Papan nama instansi	Papan nama instansi	Merk: Lokal	1,00	unit	15/11/2019	Rusak ringan
	Alat rumah tangga			21,00			
	Meubelair			13,00			
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu bantal	Merk: Informa Tipe: Kursi tunggu bantal 4 sheet warna hijau	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 3 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 3 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu bantal	Merk: Informa Tipe: Kursi tunggu bantal	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi Kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
	Alat rumah tangga lainnya (home use)			8,00			
002	Televisi	Televisi	Merk: Sharp	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Televisi	Televisi	Merk: Sharp	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Televisi	Televisi	Merk: LG 50"	1,00	unit	21/05/2018	Baik
022	Camera film	Camera film	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2012	Rusak berat
022	Camera film	Camera film	Merk: Nikon	1,00	unit	31/12/2014	Rusak berat
038	Dispenser	Dispenser	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2011	Rusak berat
048	Handy Cam	Handy Cam	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2012	Rusak berat
057	Karpet	Karpet	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat			1,00			
	Kursi kerja pejabat			1,00			
009	Kursi kerja	Kursi direktur	Merk: Informa Tipe: Kursi direktur	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
	Alat studio, komunikasi dan pemancar			6,00			
	Alat studio			5,00			
	Peralatan studio video dan film			4,00			
056	Film projector	Film projector	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2012	Rusak berat
060	Camera film	Camera film	Merk: Sony H400	1,00	unit	21/05/2018	Rusak berat

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

167	Printer	Printer epson L5290	Merk: Epson Tipe: Printer epson L5290	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
167	Printer	Printer epson L5290	Merk: Epson Tipe: Printer epson L5290	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
	Peralatan Cetak			1,00			
014	Mesin jilid	Mesin jilid	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
	Alat Komunikasi			1,00			
	Alat Komunikasi Telephone			1,00			
010	Facsimile	Facsimile	Merk: Brother	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
	Alat kedokteran dan kesehatan			1,00			
	Alat kedokteran			1,00			
	Alat kedokteran umum			1,00			
176	Kursi roda standar (stainless wheel chair)	Kursi roda	Merk: Ika care Kursi roda Tipe: Ika care kursi roda	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
	Alat laboratorium			1,00			
	Unit alat laboratorium			1,00			
	Alat laboratorium lain			1,00			
087	Automatic pipet dispenser	Automatic pipet dispenser	Merk: Miyako	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
	Komputer			88,00			
	Komputer unit			44,00			
	Personal Komputer			44,00			
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
001	P.C unit	P.C unit	Merk: Acer	1,00	unit	20/12/2021	Baik
001	P.C Unit	Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	Merk: Lenovo Tipe: Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
001	P.C Unit	Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	Merk: Lenovo Tipe: Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2014	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	22/06/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	02/12/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: ASUS	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: ASUS	1,00	unit	08/12/2015	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: HP	1,00	unit	21/05/2018	Rusak Ringan
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Ringan
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: Lenovo Ideapad 3	1,00	unit	23/06/2020	Baik
002	Lap Top	Lap Top	Merk: Lenovo Ideapad 3	1,00	unit	23/06/2020	Baik
002	Lap Top	452210001-ENL-100982708	Merk: Acer Tipe: ASPIRE 5	1,00	unit	23/05/2023	Baik
002	Lap Top	Laptop Core i5 8GB SSD512	Merk: Advan Tipe: Laptop advan workpro lite	1,00	Buah	19/12/2024	Baik
002	Lap Top	Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	Merk: Lenovo Tipe: Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
002	Lap Top	Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	Merk: Lenovo Tipe: Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
010	Lain-lain personal komputer	Personal komputer lain-lain	Merk: PROLINK PRO700SFC	1,00	unit	03/09/2019	Rusak berat
010	Lain-lain personal komputer	Personal komputer lain-lain	Merk: PROLINK PRO700SFC	1,00	unit	03/09/2019	Baik

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

	Peralatan komputer			44,00			
	Peralatan mainframe			1,00			
012	Hard Disk	Hard Disk	Merk: Wd	1,00	unit	31/12/2013	Baik
	Peralatan Personal Komputer			41,00			
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	22/06/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	02/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	21/05/2018	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	21/05/2018	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	03/09/2019	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Bak
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Rusak Ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Rusak Ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	20/12/2021	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: Printer Epson L3250	1,00	Buah	19/12/2024	Baik

004	Scanner printer (peralatan personal komputer)	Scanner Dokumen Epson ES-C320W	Merk: Epson Tipe: Scanner Epson ES-C320W	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0 s	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
	Peralatan jaringan			1,00			
029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Mobile Modem GSM/ CDMA	Merk: Advance	1,00	unit	20/12/2021	Rusak berat
	Peralatan komputer lainnya			1,00			
001	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	Merk: 0	1,00	unit	22/11/2017	Rusak berat

2.1.3. Kinerja pelayanan DPMPTSP

Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Jumlah investor PMDN/PMA skala nasional Tahun 2019-2023

Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2	3	4
2019	13	-	13
2020	11	-	11
2021	22	-	22
2022	1.802	-	1.802
2023	2.647	-	2.647

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah

Tabel 2.10
Jumlah proyek dan nilai investasi Tahun 2020-2024

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	NI (Rp.)	Jumlah Proyek	NI (Rp.)
2020	11	862.100.000.000	11	862.100.000.000
2021	22	528.825.244.901	22	528.825.244.901
2022	1.802	6.139.449.056.111	1.802	6.139.449.056.111
2023	2.647	1.457.156.011.532	2.647	1.457.156.011.532
2024		4.792.663.087.692		4.792.663.087.692

Sehubungan dengan adanya perubahan regulasi di tingkat Nasional terkait dengan proses pelayanan perizinan secara terintegrasi lewat Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memproses peizinan berusahnya, hal ini berimplikasi pada peningkatan nilai investasi di daerah. Jumlah proyek sesuai tabel 2.10 berdasarkan data NIB pada sistem OSS-RBA, sedangkan jumlah proyek pada jumlah investasi PMDN/PMA berdasarkan jumlah total sebaran proyek berdasarkan resiko pada sistem OSS-RBA.

Tabel 2.11
Jumlah realisasi perizinan, non perizinan dan nilai investasi

Jenis	Jumlah Realisasi					
	2020	2021	2022	2023		2024
Perizinan	2.742	Manual 2.063	Manual 24	Manual - Izin berusaha	116	Manual - Izin berusaha 117
				- Izin non berusaha	771	- Izin non berusaha 976
				- Non izin	78	- Non izin 83
		OSS 581	OSS 1.710	OSS - NIB	2.644	OSS - NIB 2.368
				- Proyek (KBLI)	4.255	- Proyek (KBLI)
				- PBG	434	- PBG 756
Retribusi (Rp.)	2.135.409.000	640.120.342	116.750.000	619.874.000		
NI (Rp.)	862.100.000.000	638.920.342.000	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532		4.792.663.087.692

DPMPTSP tidak ada target karena tidak berhubungan dengan PAD, yang berwenang adalah instansi terkait yang memiliki target PAD, DPMPTSP hanya merealisasikannya.

Tabel 2.12
Kinerja penyelenggara pemerintah daerah 2024 – 2029

No.	Bidang urusan / indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal								
Penanaman Modal								
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6	5	5	5	6	6	6
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4.792.663.087	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
3.	Jumlah daya serap tenaga kerja	9.686	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,09	4,11	4,13	4,14	4,16	4,20	4,20
5.	Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)	129.045.832.480	130.000.000.000	140.000.000.000	150.000.000.000	160.000.000.000	170.000.000.000	170.000.000.000
6.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	76,47	76,47	82,35	88,23	94,12	100	100
7.	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	A	A
8.	Nilai IKM perangkat daerah	87	80	81	82	83	84	84

Untuk menjaga kualitas pengembangan perencanaan, maka DPMPTSP Kabupaten Minahasa perlu meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, serta harus didukung oleh kinerja aparatur yang berkualifikasi dan berkompetensi, maka dilakukan analisis gambaran umum pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada tabel 2.13 (T-23).

Tabel 2.13
Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK (%)	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Angka	Angka	5	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Angka	Angka	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah daya serap tenaga kerja		Angka	Angka	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rasio daya serap tenaga kerja		Angka	Angka	4,11	4,13	4,14	4,16	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)		Rp.	Rp.	130.000.000.000	140.000.000.000	150.000.000.000	160.000.000.000	170.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase peningkatan investasi		%	%	76,47	82,35	88,23	94,12	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nilai SAKIP		Nilai	Nilai	B	B	B	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai	Nilai	80	81	82	83	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Menjadi Wewenang Kabupaten/ Kota		Dokumen	Dokumen	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dokumen	Dokumen	23	24	23	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Dokumen	Dokumen	16	19	22	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di		Angka	Angka	56	56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK (%)	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
13	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	Laporan	212	206	260	284	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Laporan	Laporan	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan		Dokumen	Dokumen	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi		%	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi		%	%	95	95	96	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi		%	%	95	95	96	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi		%	%	95	95	96	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD		%	%	95	95	96	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	%	98	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPMBD		%	%	93	93	94	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Gambaran kinerja pelayanan PD DPMPTSP Kabupaten Minahasa dan gambaran pelaksanaan kinerja pemanfaatan anggaran periode 2018-2023 disajikan dalam tabel 2.14 (TC.24) berikut ini:

Tabel 2.14
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Penanaman Modal																
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4,883,050,200	4,924,500,000	5,383,562,846	2.807.240.625	5.279.004.664	5.279.004.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Promosi Penanaman Modal	157,500,000	173,250,000	190,575,000	209,632,500	230,595,750	230,595,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Penanaman Modal	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	735,000,000	735,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	287,000,000	337,700,000	371,470,000	355,377,000	478,760,700	478,760,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5,390,700,000	14,599,760,000	15,871,273,000	17,151,861,650	6,750,604,733	6.650.604.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11,368,250,200	20,735,210,000	22,571,880,846	21.339.611.775	13.623.965.847	13.523.965.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mendorong peningkatan investasi di daerah, DPMPTSP Kabupaten Minahasa menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode ranwal renstra.

Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang meliputi :

1. Pelaku usaha dan investor (Eksisting dan Potensial);
2. Masyarakat umum penerima layanan publik;
3. Perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pemangku kepentingan pembangunan daerah;
5. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
6. BKPM / Kementerian Investasi dan Hilirisasi;
7. Media massa, baik cetak maupun elektronik.

2.2 Permasalahan dan isu strategis PD

2.2.1 Permasalahan pelayanan PD

DPMPTSP Kabupaten Minahasa merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, utamanya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang bersifat strategis dan memerlukan penanganan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dialami dalam menjalankan tugas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal terlihat dalam tabel 2.15 (T-B.35) sebagai berikut :

Tabel 2.15
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No (1)	Masalah pokok (2)	Masalah (3)	Akar masalah (4)
1	Kebijakan PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten minahasa; - Kebijakan dalam pengembangan iklim investasi (peta potensi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang PM); - Informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA).
2	Pengendalian pelaksanaan PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan PMPTSP ➤ Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya ➤ Bimbingan teknis kepada pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA; - Koordinasi dengan dinas terkait, stake holder dan pelaku usaha. - Terhambatnya realisasi kegiatan usaha serta belum optimalnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; - Menurunnya aktivitas berbagai sektor PMDN maupun PMA yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. - Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA serta jumlah pelaku usaha yang memiliki izin.

Tabel 2.16
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kebijakan PMPTSP	➤ Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Data potensi dan peta investasi; - Data strategi promosi; - Layanan, kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Bidang PMPTSP dalam penyediaan informasi dan penyusunan kebijakan; - Kapasitas pembiayaan; - Belum representatifnya sarana prasarana penunjang promosi kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya UU tentang cipta kerja tidak diikuti dengan turunannya termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA; - Kontribusi investor bagi peningkatan pendapatan masyarakat; - Data potensi peluang investasi belum sepenuhnya disusun sesuai RDTR dan RTRW; - Dukungan sektor terkait dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya; - Belum terbentuknya MPP yang mencakup sektor layanan publik disegala bidang; - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi; - Belum optimalnya tata kelola PM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten minahasa belum tersusun; - Belum tersusunnya pengembangan iklim investasi (peta potensi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang PM); - Ketiadaan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional; - Tidak adanya daya saing daerah; - Ketiadaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan berbasis unggulan lokal dan insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim PM; - Promosi peluang PM daerah, belum didukung oleh ketersediaan anggaran dan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA); - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA);
2. Pengendalian Pelaksanaan PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal ➤ Pengawasan PMPTSP ➤ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya ➤ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (05 Juni 2025); 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan, kapasitas dan kualitas SDM Aparatur bidang PMPTSP dalam pelaksanaan pengawasan, penyelesaian permasalahan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha; - Daya saing sektor/ komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan PM; - Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sektor terkait dalam pelayanan publik; - Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD teknis; - Belum terintegrasi Sistem Informasi pelayanan di tiap kementerian/ lembaga; - Koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah teknis belum optimal terkait OSS RBA - Penyampaian LKPM oleh Pelaku usaha; - Pengelolaan dan hilirisasi sektor unggulan untuk peningkatan perekonomian; - Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menjalankan usahanya; - Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai peraturan tentang penanaman modal di daerah; - Belum efektifnya peran koordinasi antar PD tim; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM Aparatur belum selaras dengan peta jabatan dan analisa jabatan, bukan hanya secara akademis namun secara etika melayani masyarakat; - Adaptasi dengan manajemen ASN karena perubahan sistem kerja dan penyetaraan jabatan; - Koordinasi dengan dinas terkait, stake holder dan pelaku usaha; - Terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi PM; - Terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah; - Minimnya pengawalan investasi dan pengawasan PM; - Tidak adanya daya tarik relisasi investasi berskala nasional; - Belum terbuhnya proses pengadministrasian kegiatan usaha (LKPM); - Terbatasnya aktivitas berbagai sektor PMDN maupun PMA yang

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; - Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirasi; - Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 			<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB; - Integrasi database berbasis NIK dari dukcapil sebagai bahan pendaftaran permohonan perizinan masih terkendala; - Keterbatasan sarana prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang PMPTSP.

2.2.2 Isu strategis PD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan DPMPTSP Kabupaten Minahasa di masa yang akan datang. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman.

2.2.2.1 Isu global

Beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi ekonomi dan investasi sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT);
2. Tren PMA Global yang cenderung turun;
3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global;
4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global;
5. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon;
6. Minimnya opsi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);
7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology.

2.2.2.2 Isu nasional

Pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025- 2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “*Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*” didukung dengan visi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM yaitu “*Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045*”. Representasi keberhasilan pembangunan Tahun 2025-2029 tergambar pada capaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Isu strategis nasional pada RPJPN 2025-2045 yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan pembangunan ekonomi yang masih perlu memperoleh perhatian serius terus dikembangkan dan berkelanjutan dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan PM yang berfokus pada sektor prioritas PM dan hilirisasi investasi strategis;

Strategi :

- a. Memperkuat kebijakan perencanaan PM dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sector;
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*);
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan PM dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas PM untuk meningkatkan realisasi PM;
- d. Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan dan penyelesaian masalah perizinan berbasis resiko;
- e. Mengoptimalkan PM bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah SDA;

- f. Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan PM yang berkualitas dan percepatan peningkatan PM.

2. Meningkatkan kualitas iklim dan Kerjasama PM;

Strategi :

- a. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor dan kebijakan insentif PM yang tepat sasaran;
- b. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian PMDN;
- c. Mendukung pemetaan potensi PM di daerah untuk meningkatkan pemerataan realisasi PM;
- d. Meningkatkan kerjasama PM dengan negara-negara potensial dan stakeholders terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Meningkatkan efektivitas tata Kelola PM.

Strategi :

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tat kelola PM;
- b. Meningkatkan kinerja aparatur yang berintegritas, profesional dan berkualitas.

2.2.2.3 Isu regional

Konsep arah pembangunan daerah sebagaimana dalam rencana strategis DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah “Menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan”

Misi :

1. Mencegah dan memberantas KKN serta narkoba;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. *Membangun perekonomian daerah;*
4. *Memperkuat daya saing daerah dan internasional;*
5. Meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air yang merata dan berkelanjutan;
6. Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal;

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Sasaran DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara yaitu “Meningkatnya persentase pembentukan modal tetap bruto terhadap total PDRB”

Indikator : “Persentase kontribusi PMTB terhadap total PDRB”

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya realisasi investasi, maka strategi yang akan dilakukan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan iklim PM yang berdaya saing, melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) prima;
3. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha tertentu;
6. Pendampingan proses penerbitan perizinan berusaha kepada pelaku usaha;
7. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha.

Isu strategis regional Sulawesi Utara terkait kebijakan pembangunan daerah, regional dan nasional harus lebih diperhatikan terlebih pada era pembangunan dalam penguatan kualitas dan daya saing SDM, pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan pusat riset inovasi dan teknologi di wilayah Sulawesi, penguatan dan pengembangan konektivitas antar wilayah, pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi dan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar yaitu :

1. optimalisasi kinerja sektor pariwisata;
2. peningkatan kinerja industri pengolahan;
3. peningkatan realisasi investasi;
4. peningkatan nilai komoditas unggulan daerah.

2.2.2.4 Isu daerah

Penetapan isu strategis Kabupaten Minahasa dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan permasalahan utama yaitu pembangunan Kabupaten Minahasa diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya:

1. Dinamika internasional, nasional dan regional;
2. Kebijakan pembangunan daerah lainnya yang antara lainnya:
 - bersumber dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Minahasa;
 - gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Minahasa;
 - hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum terpenuhi dalam RPJMD sebelumnya.

Beberapa aspek dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu strategi Kabupaten Minahasa yaitu :

1. aspek transformasi sosial (pilar sosial);
2. aspek transformasi ekonomi (pilar ekonomi dan lingkungan hidup);
3. aspek transformasi tata kelola (pilar hukum dan tata kelola);
4. aspek supremasi hukum dan stabilitas daerah (pilar hukum dan tata kelola);
5. aspek ketahanan sosial budaya dan ekologi (pilar sosial dan lingkungan hidup).

2.2.2.5 Isu PD

Isu strategi DPMPTSP yang berhubungan dengan pelayanan perizinan bidang PM mengacu pada isu-isu lingkungan global, nasional dan regional pada RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2025-2029, Renstra DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI 2025-2029, serta RPJPN 2025 – 2045 yaitu “*Belum optimalnya daya tarik investas*” yang disebabkan oleh beberapa masalah pokok antara lain:

1. regulasi yang sering berubah-ubah;
2. belum optimalnya ketersediaan sarpras serta SDM yang dibutuhkan bagi perluasan usaha PM;

3. peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil secara optimal;
4. belum optimalnya proses pelayanan perizinan bidang PM;
5. rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal).



Tabel 2.17
Isu Strategis PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD				Isu strategis PD (7)
		Global (3)	Nasional (4)	Regional (5)	Daerah (6)	
Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Sektor - sektor Strategis yang didukung oleh usaha mikro mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten minahasa belum tersusun; 2. Belum tersusunnya pengembangan iklim investasi (peta potensi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang PM); 3. Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA) 4. Koordinasi dengan dinas terkait, stake holder dan pelaku usaha; 5. Belum tertibnya proses pengadministrasian kegiatan usaha (LKPM); 6. Terbatasnya aktivitas berbagai sektor PMDN maupun PMA yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB; 7. Keterbatasan sarana prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang PMPTSP. 	<p>Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT); 2. Tren PMA Global yang cenderung turun; 3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global; 4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global; 5. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon; 6. Minimnya opsi pemanfaatan EBT; 7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology. 	<p>Sebagaimana RPJMN 2025- 2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju; 2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; 5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission. 	<p>Isu strategi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029, yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan realisasi investasi. 	<p>Penetapan isu strategis Kabupaten Minahasa dan tujuan pembangunan berkelanjutan diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan digitalisasi disegala bidang menopang data terintegrasi; 2. iklim investasi kondusif dan pariwisata berkelanjutan; 3. peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal; 5. regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif. 	<p>Belum optimalnya daya tarik investasi dengan beberapa masalah pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regulasi yang sering berubah-ubah; 2. belum optimalnya ketersediaan sarpras serta SDM yang dibutuhkan bagi perluasan usaha PM; 3. peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil secara optimal; 4. belum optimalnya proses pelayanan perizinan bidang PM; 5. rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan di Kabupaten Minahasa termuat di dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa terpilih adalah sebagai berikut:

“Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pariwisata: Minahasa kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam, termasuk pantai, danau, kawasan lindung dan wisata buatan, serta budaya.

Maju: Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Sejahtera: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

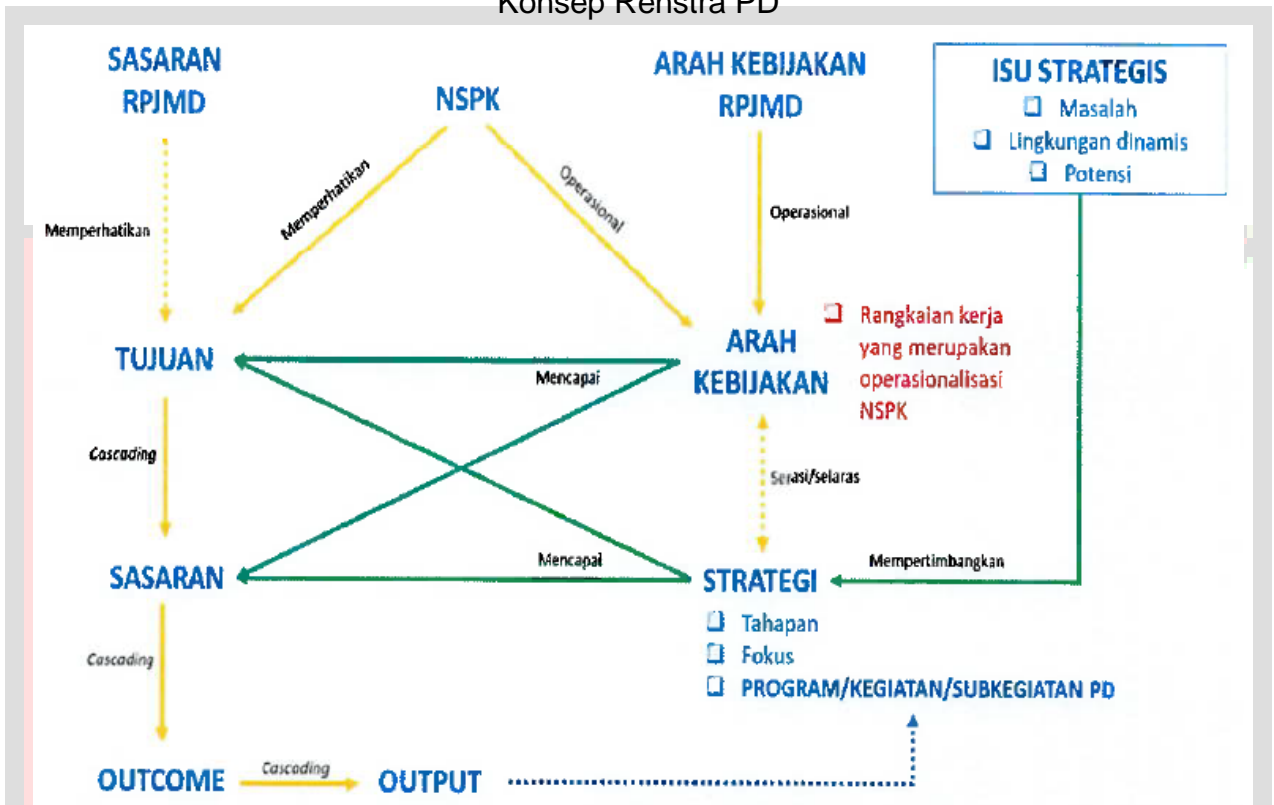
Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

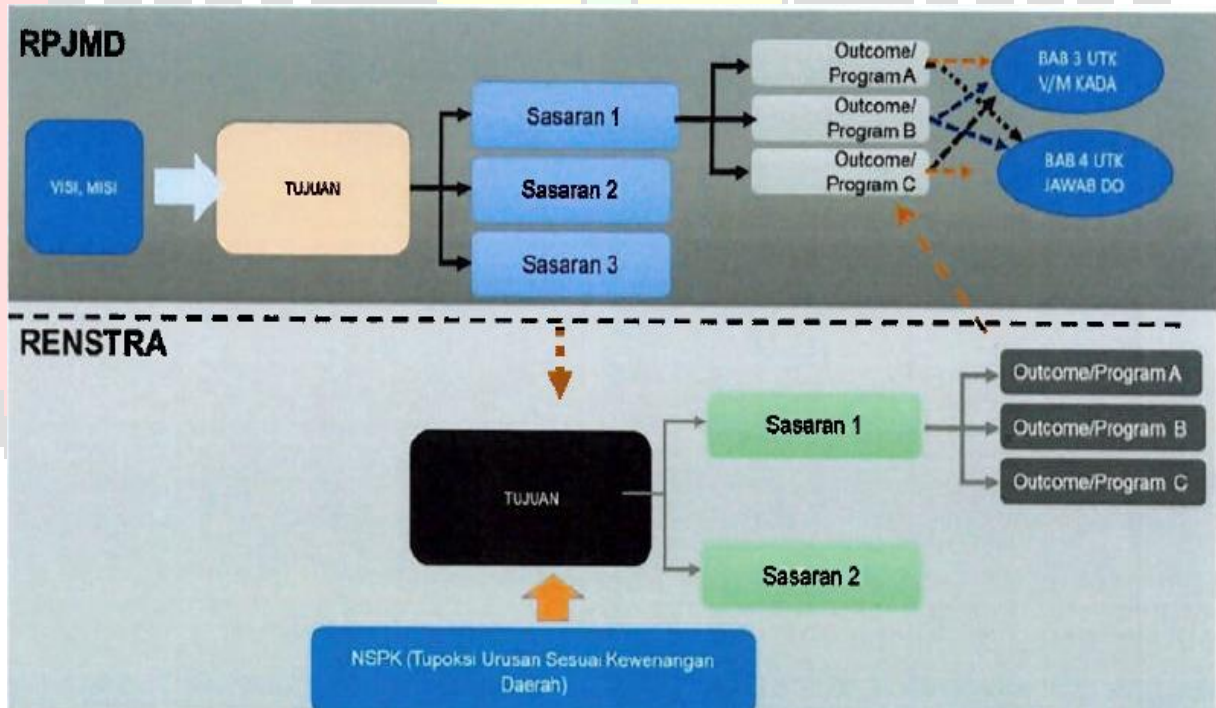
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 tersebut, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh;
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD



Tabel 3.1

Rumusan tujuan, sasaran dan indikator RPD Tahun Periode 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator
Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera	2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh	2 Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah	PE, PDRB per kapita, rasio gini
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	PDRB, indeks daya saing daerah, rasio kewirausahaan;
	3 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima	3 Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks reformasi birokrasi
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan	Indeks SPBE, indeks pencegahan korupsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik

3.1. Tujuan renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator rencana pembangunan daerah Tahun periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Tahun periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”

Indikator : Persentase peningkatan investasi

3.2. Sasaran renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran Tahun periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal;

Indikator : Persentase peningkatan usaha di daerah.

1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator : 1. Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat);

2. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Tabel 3.2

Tujuan, sasaran dan indikator DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun Periode 2025-2029

Visi	: Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera	
Misi	: 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh	
	3 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima	
Motto	Melayani anda kewajiban kami	
	Kepuasan anda kebanggaan kami	
	Indikator	
Tujuan	1 Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi
Sasaran		
1 Meningkatnya pertumbuhan PM		Persentase peningkatan usaha di daerah
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah		1 Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat)
		2 Nilai IKM

Tabel 3.3
Teknik merumuskan tujuan dan sasaran
Rancangan akhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi (%)	129.045.832.480	76,47	82,35	88,23	94,12	100	100	
- Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah		Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal	Persentase peningkatan usaha di daerah (%)	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat)	CC	B	B	B	A	A	A	
			Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) (nilai)	80	80	81	82	83	84	84	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (%)	70	80	80	80	80	80	80	

3.3. Strategi renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Strategi menjelaskan pernyataan-pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

Tahap I 2026 (1)	Tahap II 2027 (2)	Tahap III 2028 (3)	Tahap IV 2029 (4)	Tahap V 2030 (5)
Meningkatkan layanan, kapasitas dan kualitas layanan publik	Penguatan regulasi dalam pelayanan publik	Menciptakan iklim investasi	Meningkatkan daya tarik investasi	Menjaga iklim investasi agar berkelanjutan
Monev kinerja tahun pertama pencapaian Renstra 2025-2029	Monev kinerja tahun kedua pencapaian Renstra 2025-2029	Monev kinerja tahun ketiga pencapaian Renstra 2025-2029	Monev kinerja tahun keempat pencapaian Renstra 2025-2029	Evaluasi kinerja Renstra 2025-2029

3.4. Arah kebijakan renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Arah kebijakan menjelaskan rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Ranwal RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan	Peraturan daerah yang adaptif dan menciptakan rasa aman dan ketertiban	Penyederhanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada agar proses pelayanan lebih fleksibel, cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung kepastian hukum dan kepatuhan; - Mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien
			Pengawasan internal terhadap penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha agar tepat waktu sesuai SOP	
			Memberikan kemudahan terhadap proses konsultasi dan pengaduan serta tindak lanjut	
			Pelaksanaan kegiatan SKM secara berkala demi peningkatan pelayanan	
			Penyediaan media informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang aplikatif dan up to date	
			Peningkatan sarpras penunjang pelayanan	
			Peningkatan kualitas pengetahuan dan kompetensi SDM Aparatur bidang PMPTSP	
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	- Produktivitas dan serapan tenaga kerja, serta budaya inovasi	Penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan daya saing investasi daerah; - Mendorong investasi yang berkelanjutan.
			Peningkatan tertib administrasi pelaku usaha terhadap kegiatan usahanya melalui kepatuhan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha	
			Peningkatan layanan perizinan dan non perizinan ke pelaku usaha	
			- Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	
		Penyusunan peta potensi dan peluang investasi		
		Penyusunan strategi promosi melalui berbagai media cetak maupun elektronik		
		Penyusunan dan penetapan pemberian kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan investasi di daerah		
		Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota		
Penyediaan data potensi dan peluang investasi di daerah				

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

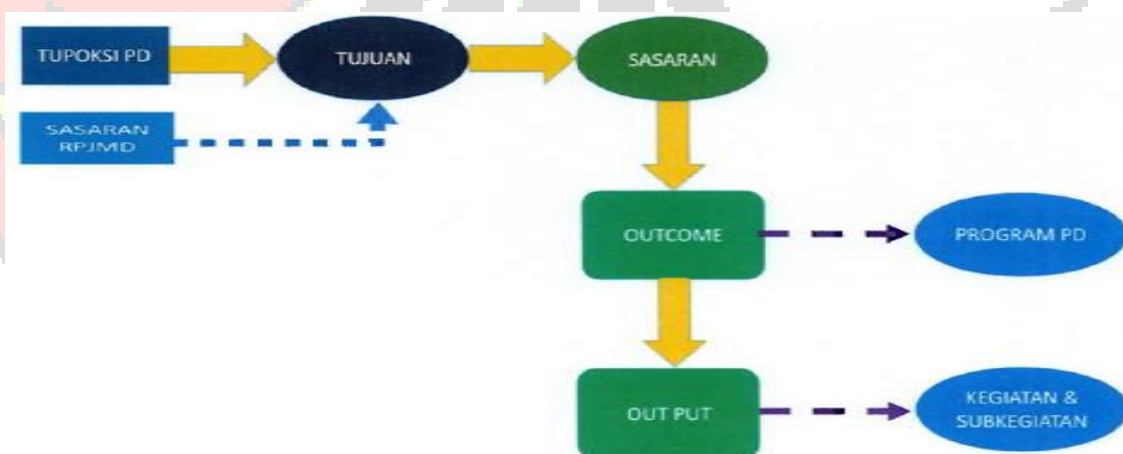
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan perangkat daerah adalah sekumpulan rencana kerja yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Dalam proses penyusunan ranhir renstra, diperlukan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program kerja dalam 5 tahun kedepan yang nantinya bertujuan mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



4.1. Program

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.168.686.405		22.571.880.846		21.339.611.775		13.623.965.847		13.523.965.847	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.066.186.405		15.871.273.000		17.151.861.650		6.750.604.733		6.650.604.733	
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	B	10.066.186.405	B	15.871.273.000	B	17.151.861.650	A	6.750.604.733	A	6.650.604.733	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					20.000.000		5.383.562.846		2.807.240.625		5.279.004.664		5.279.004.664	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	76,47	76,47	82,35	20.000.000	88,23	5.383.562.846	94,12	2.807.240.625	100	5.279.004.664	100	5.279.004.664	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					22.500.000		190.575.000		209.632.500		230.595.750		230.595.750	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	11,85	11,85	16	22.500.000	19	190.575.000	21	209.632.500	21	230.595.750	23	230.595.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					19.000.000		605.000.000		665.500.000		735.000.000		735.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	0	0	16,36	19.000.000	18	605.000.000	19,8	665.500.000	21,78	735.000.000	24,05	735.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					40.000.000		371.470.000		355.377.000		478.760.700		478.760.700	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0	10,24	10,24	40.000.000	12,5	371.470.000	14,29	355.377.000	16,67	478.760.700	20	478.760.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					1.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	20	20	20	1.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					10168686405.00		22571880846.00		21339611775.00		13623965847.00		13523965847.00	

4.2. Kegiatan

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Tersusunnya Kajian Penetapan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Dilegitimasi Melalui Produk Hukum	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Persentase Peningkatan Usaha di Daerah (%)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)		
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)		
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)		
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Pembelajaran dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan Tiap Tahun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terkendalanya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Tertindakannya pengendalian PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
					Nilai SAKIP (Predikat)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ?		
		Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional			Nilai SAKIP (Predikat)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Subkegiatan dan pagu indikatif

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, seperti pada tabel 4.3:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.168.886.405		22.571.880.846		21.339.611.775		13.623.965.847		13.523.965.847		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				10.066.186.405		15.871.273.000		17.151.861.650		6.750.604.733		6.650.604.733		
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	B	10.066.186.405	B	15.871.273.000	B	17.151.861.650	A	6.750.604.733	A	6.650.604.733	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tesusnya dokumen Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tesusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tesedainya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tetaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.772.143.800		3.088.500.000		3.242.850.000		3.404.917.500		3.404.917.500		
Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	2.772.143.800	0	3.088.500.000	0	3.242.850.000	0	3.404.917.500	0	3.404.917.500		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.772.143.800		3.087.000.000		3.241.350.000		3.403.417.500		3.403.417.500			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	25	2.772.143.800	25	3.087.000.000	25	3.241.350.000	25	3.403.417.500	25	3.403.417.500			
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		500.000		500.000		500.000		500.000			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000			
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0			
Tefaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		0		0			
Tefaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		0		0			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		500.000		500.000		500.000		500.000			
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000			
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		500.000		500.000		500.000		500.000			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah				0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terkelolanya Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tetaksananya Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tetaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tetaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tetfaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tetfaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.250.000		300.982.500		316.031.625		331.833.209		331.833.209		
Tetfaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	12	42.250.000	12	300.982.500	12	316.031.625	12	331.833.209	12	331.833.209		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	96		96		96		96		96			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		66.150.000		69.457.500		72.930.375		72.930.375		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	20	0	20	66.150.000	20	69.457.500	20	72.930.375	20	72.930.375		
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.250.000		71.662.500		75.245.625		79.007.906		79.007.906		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	96	42.250.000	96	71.662.500	96	75.245.625	96	79.007.906	96	79.007.906		
2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.293.038		
Tetfaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	0	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038	12	7.293.038		
2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.293.038		
Tetfaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	12	0	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038	12	7.293.038		
2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.293.038		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tetaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	12	0	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038	12	7.293.038		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		55.125.000		57.881.250		60.775.313		60.775.313		
Tetaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	0	5	55.125.000	5	57.881.250	5	60.775.313	5	60.775.313		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		33.075.000		34.728.750		36.465.188		36.465.188		
Tetaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50	0	50	33.075.000	50	34.728.750	50	36.465.188	50	36.465.188		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		55.125.000		57.881.250		60.775.313		60.775.313		
Tetaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	0	5	55.125.000	5	57.881.250	5	60.775.313	5	60.775.313		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.141.400		1.490.580.000		1.565.109.000		1.643.364.452		
Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0			117.141.400	0	1.490.580.000	0	1.565.109.000	0	1.643.364.452		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12				12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12				12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12				12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	12				12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1				1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12				12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12				12		12		12			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.426.500		6.615.000		6.945.750		7.293.038		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12			1.426.500	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.999.600		13.230.000		13.891.500		14.586.075		14.586.075		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	24.999.600	12	13.230.000	12	13.891.500	12	14.586.075	12	14.586.075		
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.999.300		13.230.000		13.891.500		14.586.075		14.586.075		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	9.999.300	12	13.230.000	12	13.891.500	12	14.586.075	12	14.586.075		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		2.205.000		2.315.250		2.431.013		2.431.013		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	0	1	2.205.000	1	2.315.250	1	2.431.013	1	2.431.013		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000		26.460.000		27.783.000		29.172.150		29.172.150		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	3.000.000	12	26.460.000	12	27.783.000	12	29.172.150	12	29.172.150		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		66.150.000		69.457.500		72.930.375		72.930.375		
Tefaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	0	12	66.150.000	12	69.457.500	12	72.930.375	12	72.930.375		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.716.000		1.349.460.000		1.416.933.000		1.487.779.650		1.487.779.650		
Tefaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	12	77.716.000	12	1.349.460.000	12	1.416.933.000	12	1.487.779.650	12	1.487.779.650		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.293.038		
Tefaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12	0	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038	12	7.293.038		
2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.293.038		
Tefaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	0	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.038	12	7.293.038		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.689.647.680		9.546.000.000		10.498.300.000		806.702.500		706.702.500		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	6.689.647.680	1	9.546.000.000	1	10.498.300.000	0	806.702.500	0	706.702.500		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		10		20		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8		10		10		10		10			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		3		3		0		0				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				10		20		5		0				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		20		20		20		20				
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		0		
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		1.580.000.000		1.659.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		3		1.659.000.000		0		0		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					98.760.000		441.000.000		463.050.000		486.202.500		486.202.500		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		98.760.000		441.000.000		463.050.000		486.202.500		486.202.500		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					87.403.680		200.000.000		210.000.000		220.500.000		220.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8		87.403.680		200.000.000		210.000.000		220.500.000		220.500.000		
2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.500.000.000		6.825.000.000		7.166.250.000		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		6.500.000.000		6.825.000.000		7.166.250.000		0		0		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		300.000.000		600.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		10		300.000.000		0		0		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.484.000		200.000.000		400.000.000		100.000.000		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				3.484.000		10		200.000.000		20		400.000.000		5
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.313.525		439.603.000		461.793.150		484.882.803		484.882.803		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		397.313.525		12		439.603.000		12		484.882.803		12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12				12

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peleengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.754.000		8.820.000		9.261.000		9.724.050		9.724.050			
Tetapaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.754.000	12	8.820.000	12	9.261.000	12	9.724.050	12	9.724.050			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				141.599.525		165.375.000		173.643.750		182.325.938		182.325.938			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	141.599.525	12	165.375.000	12	173.643.750	12	182.325.938	12	182.325.938			
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Peleengkapan Kantor				3.000.000		6.300.000		6.615.000		6.945.750		6.945.750			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Peleengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peleengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	3.000.000	2	6.300.000	2	6.615.000	2	6.945.750	2	6.945.750			
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				246.960.000		259.108.000		272.273.400		285.887.065		285.887.065			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	246.960.000	12	259.108.000	12	272.273.400	12	285.887.065	12	285.887.065			
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.190.000		997.607.500		1.059.777.875		70.904.269		70.904.269			
Tetapiharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	42.190.000	1	997.607.500	1	1.059.777.875	0	70.904.269	0	70.904.269			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		0		0				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		10		10				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		5		5		5				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		4		4		4		4				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		0		0				
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.190.000		47.407.500		49.777.875		52.266.769		52.266.769			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	42.190.000	4	47.407.500	4	49.777.875	4	52.266.769	4	52.266.769			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		5.200.000		5.250.000		5.512.500		5.512.500		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	1	5.200.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.512.500		
2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		12.500.000		13.125.000		13.125.000		
Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	5	12.500.000	5	13.125.000	5	13.125.000		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		525.000.000		551.250.000		0		0		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0	1	525.000.000	1	551.250.000	0	0	0	0		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		157.500.000		165.375.000		0		0		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0	1	157.500.000	1	165.375.000	0	0	0	0		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		262.500.000		275.625.000		0		0		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0	1	262.500.000	1	275.625.000	0	0	0	0		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				20.000.000		5.383.562.846		2.807.240.625		5.279.004.664		5.279.004.664		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	76,47	82,35	20.000.000	88,23	5.383.562.846	94,12	2.807.240.625	100	5.279.004.664	100	5.279.004.664	2.18.0.00.0.00.01.00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		3.125.587.500		2.749.359.375		2.886.827.344		2.886.827.344		
Tersusunnya Kajian Penetapan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Dilegitimasi Melalui Produk Hukum	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	3.125.587.500	1	2.749.359.375	1	2.886.827.344	1	2.886.827.344		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		882.000.000		578.812.500		607.753.125		607.753.125	
Diletakkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	0	1		882.000.000	1	578.812.500	1	607.753.125	1	607.753.125	
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				20.000.000		1.984.500.000		2.083.725.000		2.187.911.250		2.187.911.250		
Tetaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	12	20.000.000	12	1.984.500.000	12	2.083.725.000	12	2.187.911.250	12	2.187.911.250		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko					0		259.087.500		86.821.875		91.162.969		91.162.969	
Diletakkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	0	1		259.087.500	1	86.821.875	1	91.162.969	1	91.162.969	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		2.257.975.346		57.881.250		2.392.177.320		2.392.177.320	
Tesusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	23		23		2.257.975.346	23	57.881.250	23	2.392.177.320	23	2.392.177.320	
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1			0		1		1		
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1			0		1		1		
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		240.400.346		0		1.216.175.022		1.216.175.022	
Tesusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1		240.400.346	0	0	1	1.216.175.022	1	1.216.175.022	
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)					0		55.125.000		57.881.250		60.775.313		60.775.313	
Tersedianya data potensi investasi daerah yang temutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	23		23		55.125.000	23	57.881.250	23	60.775.313	23	60.775.313	
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		1.962.450.000		0		1.115.226.985		1.115.226.985	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Peta Polensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Polensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	1.962.450.000	0	0	1	1.115.226.985	1	1.115.226.985		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				22.500.000		190.575.000		209.632.500		230.595.750		230.595.750		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	11,85	16	22.500.000	19	190.575.000	21	209.632.500	21	230.595.750	23	230.595.750	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				22.500.000		190.575.000		209.632.500		230.595.750		230.595.750		
Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	11	22.500.000	12	190.575.000	14	209.632.500	15	230.595.750	15	230.595.750		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	5		7		8		10		10			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		160.325.000		176.357.500		193.993.250		193.993.250		
Terdaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	11	20.000.000	12	160.325.000	14	176.357.500	15	193.993.250	15	193.993.250		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500		36.602.500		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	5	2.500.000	7	30.250.000	8	33.275.000	10	36.602.500	10	36.602.500		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				19.000.000		605.000.000		665.500.000		735.000.000		735.000.000		
Meningkatnya perizinanberusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan kelerntuan (IUP/PSIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/UTS/ISIUP Toko Swalayan) (%)	0	16,36	19.000.000	18	605.000.000	19,8	665.500.000	21,78	735.000.000	24,05	735.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				19.000.000		605.000.000		665.500.000		735.000.000		735.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan Tiap Tahun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	19.000.000	5	605.000.000	5	665.500.000	6	735.000.000	6	735.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	150		150		200		200		200			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	100		100		100		100		100				
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0	100		100		100		100		100				
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pembefian Fasilitas/Insentif Daerah				10.000.000		155.000.000		165.500.000		185.000.000		185.000.000			
Tetaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pembefian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	10.000.000	5	155.000.000	5	165.500.000	6	185.000.000	6	185.000.000			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000			
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	150	1.000.000	150	200.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000			
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				3.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Tersedianya dan terlaksananya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	100	3.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000			
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				5.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000			
Tetaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0	100	5.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000			
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				40.000.000		371.470.000		355.377.000		478.760.700		478.760.700			
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0	10,24	40.000.000	12,5	371.470.000	14,29	355.377.000	16,67	478.760.700	20	478.760.700	2.18.000.000.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		371.470.000		355.377.000		478.760.700		478.760.700		
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	24	30	40.000.000		371.470.000	30	355.377.000	30	478.760.700	30	478.760.700		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	150	175		200		225		250		250			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	7		6		5		4		4			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5.000.000		91.560.000		65.219.000		91.262.200		91.262.200		
Tertaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	7	5.000.000	6	91.560.000	5	65.219.000	4	91.262.200	4	91.262.200		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				20.000.000		224.660.000		251.559.000		325.518.200		325.518.200		
Tertaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	150	175	20.000.000	200	224.660.000	225	251.559.000	250	325.518.200	250	325.518.200		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				15.000.000		55.250.000		38.599.000		61.980.300		61.980.300		
Tertaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	24	30	15.000.000		55.250.000	30	38.599.000	30	61.980.300	30	61.980.300		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DPMPSTP KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	20	20	1.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Terfaksananya pengendalian PMAJPMON yang menyampaikan LKPM	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0	12	1.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000			
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				1.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0	12	1.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000			

4.4. Subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.4

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah rancangan akhir renstra DPMPPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket. (5)
1.	Program pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan 1 : Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	
			Sub kegiatan 1.1 : Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			Sub kegiatan 1.2 : Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	
			Sub kegiatan 1.3 : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	
			Kegiatan 2 : Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	
			Sub kegiatan 2.1 : Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	
			Sub kegiatan 2.2 : Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (potensi investasi regional)	
			Sub kegiatan 2.3 : Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Program promosi penanaman modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	
			Sub kegiatan 1.1 : Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	
			Sub kegiatan 1.2 : Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/ kota	
3.	Program pelayanan penanaman modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Kegiatan 1 : Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	
			Sub kegiatan 1.1 : Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	
			Sub kegiatan 1.2 : Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	
			Sub kegiatan 1.3 : Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Sub kegiatan 1.4 : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	
			Sub kegiatan 1.1 : Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			Sub kegiatan 1.2 : Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	
			Sub kegiatan 1.3 : Pengawasan penanaman modal	
5.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Kegiatan 2 : Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota	
			Sub kegiatan 2.1 : Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui IKU

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	A	A	A	
3.	Persentase Peningkatan Usaha di Daerah	%	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,5	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80	81	82	83	84	84	
5.	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) ? B	%	70	80	80	80	80	80	80	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKK

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Nilai SAKIP	positif	Predikat	CC	B	B	B	A	A	A	
3.	Persentase Peningkatan Usaha di Daerah	positif	%	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,5	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	80	80	81	82	83	84	84	
5.	Persentase Instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	positif	%	70	80	80	80	80	80	80	

4.7. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKD

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	A	A	A	
2	Persentase Peningkatan Usaha di Daerah	%	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,5	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80	81	82	83	84	84	
4	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	70	80	80	80	80	80	80	

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Minahasa disusun untuk menjadi acuan didalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang lebih terukur dan akuntabel, yang memuat prioritas pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan maksud membuat landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan program pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Dokumen ranhir renstra ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai 5 (lima) tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranhir renstra PD) yang memuat tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029;
2. Penetapan ranhir renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, maka seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Minahasa maupun semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan secara tanggungjawab;

3. Rambah renstra Tahun 2025-2029 akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2030;
4. Harapan setelah penyusunan rambah renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 ini agar terjalin komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam rambah renstra ini. Hendaknya rambah renstra ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja DPMPTSP secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Demikian rambah renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 disusun sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat responsive dalam menentukan kebijakan dan langkah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Disadari bahwa dalam penyusunan rambah renstra ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan DPMPTSP, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

KEPALA DINAS,



Mekry J. Sondey, SE, MSi
Pembina Utama Muda

NIP. 19660506 199003 1 013